



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
TAHUN AKADEMIK  
GANJIL 2021–2022**



**GUGUS PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG  
2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

|              |  |
|--------------|--|
| Kode Dokumen | LME/FISIP  |
| Tanggal      | 2021   |
| Revisi       | -  |
| Tim Auditor  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. M. Iksan Badarudin, S.Pi., M.Si</li><li>2. Ihsan Febriadi, S.Hut., M.Si</li><li>3. Muzna A. Gafur, SP., M.Si</li><li>4. Ponisri, S.Hut., M.Si</li></ol> |

Sorong, Desember 2021

Mengetahui,  
Dekan FISIP,



Arie Purnomo, S.IP., M.Si  
NIDN. 1217018201

GPM FISIP

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Masni Banggu".

Masni Banggu, S.IP., M.Si  
NIDN. 1405098901

## **A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi merupakan suatu hal yang penting, salah satunya proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Dosen berperan penting dalam proses kegiatan pembelajaran agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dipastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan terarah, oleh karena itu sistem penjaminan mutu fakultas bertujuan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong.

Monitoring pembelajaran menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Oleh karena itu pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegratif dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penganalisaan yang diharapkan dapat memberi hasil kinerja program studi terhadap output kualitas operasional. Kemudian evaluasi merupakan hasil akhir dari kegiatan monitoring yang dilakukan selama proses pembelajaran semester.

Kegiatan monitoring merupakan langkah atau strategi untuk mengetahui keberhasilan indikator standar atau program kerja yang harus dilaksanakan program studi yang sesuai dengan hasil yang diharapkan dan ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi laporan kegiatan perkuliahan pada setiap semester. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dilakukan pada tahun 2022 untuk mengevaluasi kegiatan atau proses pembelajaran pada tahun akademik 2021-2022. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Auditor Internal yang telah ditunjuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Muhammadiyah Sorong.

## **B. TUJUAN**

Secara umum, kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dilakukan disetiap program studi untuk;

- 1) Mengetahui sejauh mana perencanaan, proses dan hasil pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen-dosen pada setiap program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- 2) Melakukan pengendalian terhadap proses pembelajaran agar kegiatan berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang direncanakan
- 3) Mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan perkuliahan serta informasi berkelanjutan proses pembelajaran berikutnya
- 4) Mendapatkan masukan/saran untuk perbaikan sebagai bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan oleh jajaran pimpinan fakultas.

## C. METODE

- 1) Jadwal Pelaksanaan kegiatan Monev:

| NO | KEGIATAN                | TANGGAL PELAKSANAAN |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1. | PENGISIAN INSTRUMEN AMI | 15 November 2021    |
| 2. | DESK EVALUASI AUDITOR   | 22 November 2021    |
| 3. | ASESMEN LAPANGAN        | 02 Desember 2021    |

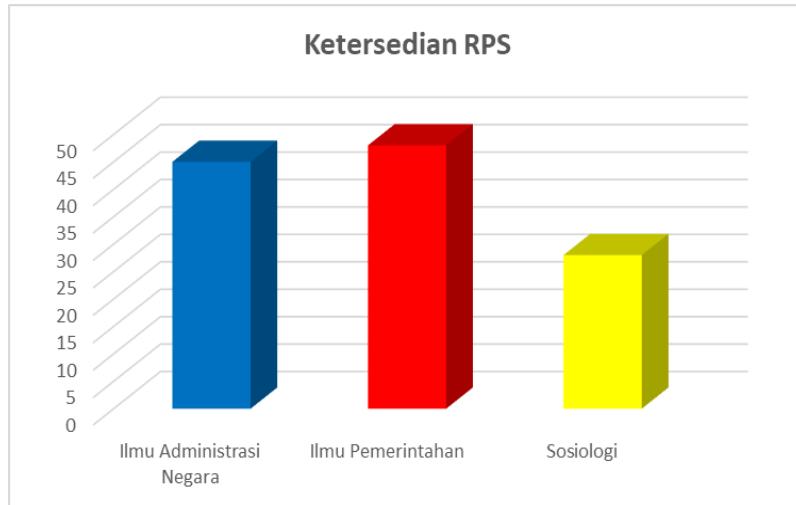
- 2) Pelaksanaan monev terhadap proses pembelajaran di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dilakukan dengan metode wawancara dengan Ketua Program Studi dan ketersediaan dokumen.
- 3) Indikator yang menjadi evaluasi yakni perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran seperti pada link berikut
- 4) Hasil monev disampaikan kepada Dekan dalam bentuk rekapan laporan.

## D. HASIL MONEV

Berdasarkan hasil monev yang dilakukan dengan wawancara langsung ketua program studi serta pengecekan ketersedian dokumen yang sesuai dengan instrumen penilaian dalam monev, diperoleh beberapa informasi yang menjadi temuan (minor dan mayor) dalam evaluasi proses pembelajaran.

1. Ketersediaan RPS pada Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat dilihat pada gambar 1, yang dijelaskan bahwa pada gambar grafik tersebut terdapat adanya ketersedian RPS di Program Studi Ilmu Administrasi negara sebanyak

45 RPS, Prodi Ilmu Pemerintahan sebanyak 48 RPS dan Prodi Sosiologi sebanyak 28 RPS.



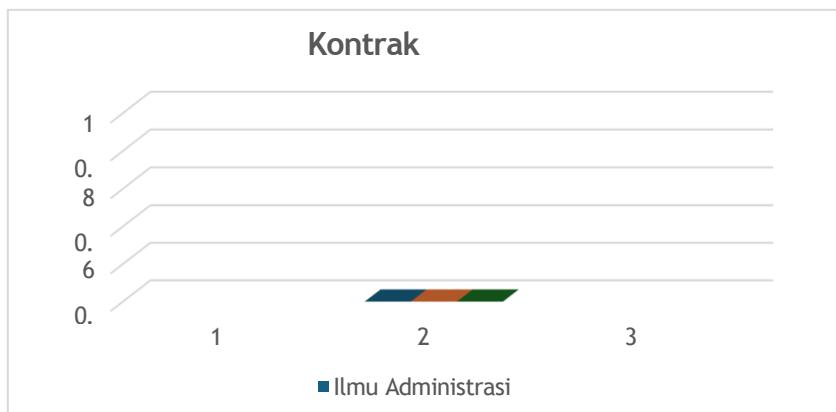
Gambar 1. Grafik Ketersediaan RPS Pada Program Studi

Ketersediaan RPS paling tinggi ada pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, yaitu berjumlah 48 Dokumen. Tingginya angka tersebut Mengindikasikan bahwa hampir Seluruh Mata Kuliah di Program Studi tersebut telah memiliki RPS yang Tersusun dengan Baik. Kondisi tersebut Mencerminkan Keseriusan Pengelola Program Studi dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembelajaran yang menjadi Pedoman Dosen dalam Melaksanakan Perkuliahan.

Menempati Posisi kedua dengan Jumlah Ketersediaan RPS Sekitar 45 Dokumen. Walaupun sedikit lebih Rendah dibandingkan Ilmu Pemerintahan, Angka tersebut Menunjukkan Bahwa Mayoritas Mata Kuliah telah Memiliki RPS. Hal ini Menandakan adanya Komitmen dan Konsistensi dalam Menyediakan Perangkat Pembelajaran Meskipun masih terdapat beberapa Mata Kuliah yang Mungkin Memerlukan Perbaikan atau Pembaruan.

Menunjukkan Angka ketersediaan RPS yang lebih Rendah, yaitu sekitar 28 Dokumen. Kondisi ini Memberi Gambaran bahwa masih terdapat Sejumlah mata Kuliah yang belum memiliki RPS atau belum Diperbaharui sesuai Kebutuhan Kurikulum terbaru. Rendahnya jumlah RPS ini dapat menjadi catatan penting bagi Pengelola Program Studi untuk Meningkatkan Penyusunan Perangkat Pembelajaran agar lebih Proporsional dengan Jumlah Mata Kuliah yang tersedia.

2. Ketersediaan Kontrak Perkuliahan pada program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Grafik Ketersediaan Kontrak Perkuliahan

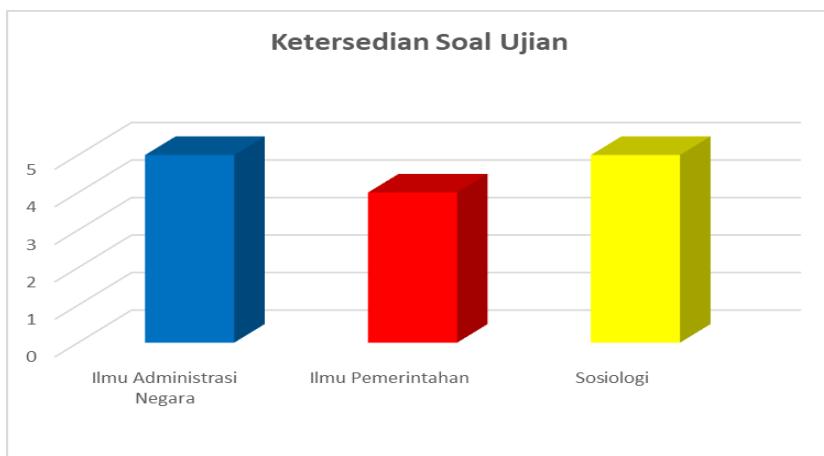
Berdasarkan diagram di atas, ketersediaan kontrak perkuliahan di tiga program studi dilingkungan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik tidak ada. Kontrak perkuliahan hanya ada penjelasan dalam RPS mata kuliah tiap dosen bukan dalam bentuk format tersendiri. Biasanya penjelasan tentang kontrak perkuliahan dipaparkan dalam pertemuan pertama di kelas.

Diagram batang tiga dimensi mengenai Kontrak Perkuliahan menampilkan tingkat ketersediaan dokumen kontrak perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa jumlah kontrak perkuliahan yang tersedia masih sangat terbatas, yaitu hanya tiga dokumen. Ketiga batang yang terlihat pada diagram menunjukkan nilai yang relatif sama dan berada pada rentang angka yang rendah, menandakan bahwa penyusunan dokumen kontrak perkuliahan belum dilakukan secara menyeluruh untuk semua mata kuliah yang diajarkan.

Keterbatasan jumlah kontrak perkuliahan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi standar mutu pembelajaran belum sepenuhnya optimal. Idealnya, setiap mata kuliah wajib memiliki kontrak perkuliahan yang disusun pada awal semester untuk menjadi pedoman dalam proses pengajaran. Kontrak perkuliahan berfungsi sebagai dokumen yang menjelaskan hak dan kewajiban dosen serta mahasiswa, mencakup ruang lingkup materi, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan aturan akademik lainnya. Dengan demikian, keberadaan kontrak perkuliahan menjadi instrumen penting dalam

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas proses pembelajaran.

3. Ketersediaan soal ujian pada program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini, yang mana gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa tidak semua dosen menyertorkan lembaran soal ujian mata kuliah yang diampuh kepada ketua program studi. Hanya beberapa mata kuliah saja yang mengumpulkan soal ujian seperti di prodi Ilmu Administrasi Negara hanya 5 mata kuliah, prodi Ilmu Pemerintahan hanya 4 mata kuliah dan prodi sosiologi hanya 5 mata kuliah.



Gambar 3. Grafik Ketersediaan Ketersedian Soal Ujian

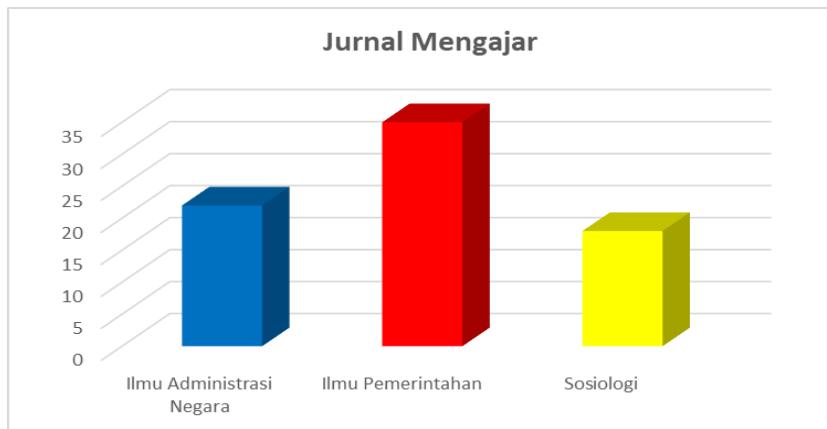
Program Studi Administrasi Negara memiliki 5 soal ujian. Jumlah ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam diagram. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan bahan evaluasi pada Prodi Ilmu Administrasi Negara sudah tergolong cukup baik dan lengkap.

Program Studi Ilmu Pemerintahan menyediakan 4 soal ujian. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding dua prodi lainnya, tetapi tetap menunjukkan bahwa sebagian besar mata kuliah sudah memiliki soal ujian. Hanya saja masih ada beberapa mata kuliah yang perlu dilengkapi.

Program Studi Sosiologi memiliki 5 soal ujian sama seperti Ilmu Administrasi Negara. Ini menandakan bahwa kesiapan akademik Prodi Sosiologi dalam menyediakan soal ujian berada pada tingkat yang tinggi.

4. Ketersediaan jurnal mengajar pada program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang dapat dilihat pada gambar 4. Pada gambar grafik jurnal mengajar, menggambarkan bahwa hampir 50% jurnal mengajar dosen dikumpulkan pada ketua program studi. Jurnal mengajar biasanya dikumpulkan oleh dosen setelah akhir semester

untuk dikumpulkan pada ketua program studi.

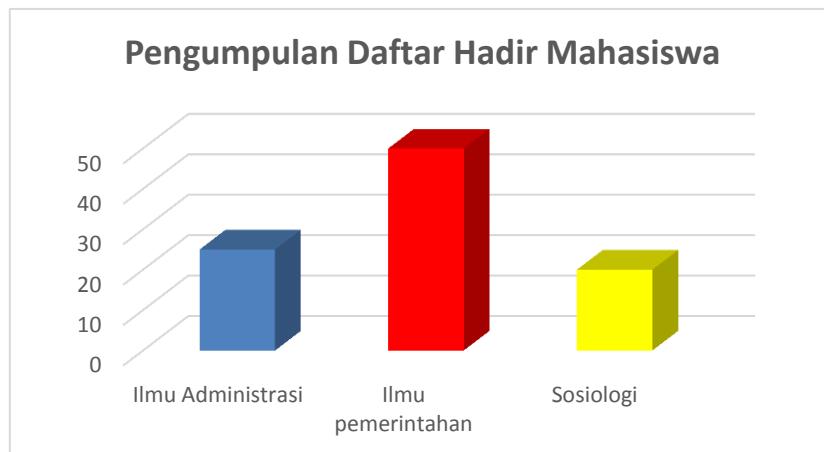


Gambar 4. Grafik Ketersediaan Jurnal Mengajar

Program Studi Ilmu Administrasi Negara memiliki sekitar 22 jurnal. Jumlah ini menunjukkan ketersediaan referensi akademik yang cukup baik, sedangkan Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki jumlah jurnal tertinggi, yaitu sekitar 35 jurnal, hal ini menunjukkan bahwa Program Studi Ilmu Pemerintahan paling siap dalam hal penyediaan sumber referensi ilmiah, dan memiliki dukungan literatur yang lebih lengkap dibandingkan dua prodi lainnya dan Program Studi Sosiologi memiliki sekitar 18 jurnal, menjadi jumlah yang paling rendah dalam diagram. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, prodi ini tetap memiliki dasar referensi, namun masih perlu peningkatan dalam pengumpulan jurnal atau publikasi ilmiah.

Secara keseluruhan, ketiga program studi sudah memiliki jurnal sebagai sumber referensi, namun tingkat ketersediaannya masih berbeda-beda.

5. Ketersediaan pengumpulan daftar hadir mahasiswa pada program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, dapat dilihat pada gambar 5. Setelah perkuliahan dan ujian akhir semester selesai, para dosen mengumpulkan daftar hadir mahasiswa kepada Ketua Program Studi. Dapat dilihat pada diagram di atas, hampir 50% daftar hadir mahasiswa disetorkan kepada prodi.



Gambar 5. Grafik Ketersediaan Pengumpulan Daftar Hadir Mahasiswa

Mencatat jumlah Pengumpulan daftar hadir sekitar 25 mahasiswa. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik, meskipun belum optimal. Partisipasi pada level ini dapat menggambarkan bahwa proses monitoring kehadiran berjalan dengan cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal komunikasi dan pengawasan agar seluruh mahasiswa lebih konsisten dalam melaporkan kehadirannya.

Menempati posisi tertinggi dengan jumlah pengumpulan absensi sekitar 50 mahasiswa. Capaian ini dapat menunjukkan bahwa mahasiswa pada program studi ini memiliki tingkat kepatuhan dan kedisiplinan yang sangat tinggi terkait administrasi akademik. Tingginya angka tersebut juga dapat mencerminkan keberhasilan pengelolaan kelas, ketegasan dosen pengampu, serta budaya akademik yang lebih mapan dalam hal pelaporan kehadiran. Selain itu, hal ini berpotensi mengindikasikan bahwa komunikasi dan koordinasi antara dosen, ketua kelas, dan mahasiswa berjalan dengan sangat baik.

Menunjukkan jumlah pengumpulan absensi terendah, yaitu sekitar 20 mahasiswa. Rendahnya angka ini mengisyaratkan adanya tantangan dalam hal kedisiplinan dan partisipasi akademik. Beberapa kemungkinan penyebabnya dapat berupa kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengumpulan daftar hadir, lemahnya sistem pengawasan, atau rendahnya motivasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus dari pengelola program studi agar dapat dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pencatatan kehadiran maupun pola koordinasi di lingkungan mahasiswa.

Secara keseluruhan, diagram ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai perbedaan tingkat keaktifan mahasiswa dalam memenuhi kewajiban administratif berupa pengumpulan daftar hadir. Data tersebut tidak hanya menggambarkan partisipasi, tetapi juga dapat menjadi indikator awal untuk menilai dinamika akademik di masing-masing program studi. Hasil analisis ini dapat dijadikan dasar bagi pihak fakultas atau program studi untuk melakukan perbaikan sistem administratif, meningkatkan disiplin mahasiswa, serta memperkuat komunikasi akademik agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan terukur.

## E. KESIMPULAN

1. Banyaknya Dosen yang belum menyusun RPS sesuai dengan kurikulum program studinya ataupun belum mengumpulkan RPS mata kuliah kepada ketua program studi.
2. Semua dosen belum memahami pentingnya kontrak perkuliahan
3. Banyaknya dosen yang belum mengumpulkan soal ujian semester di program studi.
4. Banyaknya dosen yang belum mengumpulkan daftar hadir mahasiswa pada ketua prodi.

## F. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Prodi dapat menyelenggarakan pelatihan atau workshop mengenai penyusunan RPS yang sesuai dengan kurikulum.
2. Berikan batas waktu yang jelas untuk menyusun dan mengumpulkan RPS.
3. Prodi membuat format kontrak perkuliahan sebagai acuan untuk digunakan oleh dosen di setiap mata kuliahnya. Dan tentukan batas waktu pengumpulan kontrak perkuliahan.
4. Ketua prodi harus berkomunikasi dengan dosen mengenai pentingnya koordinasi dalam pembuatan soal dan melampirkan soal ujian dalam RPS.
5. Berikan batas waktu untuk dosen menyerahkan daftar hadir.